



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. A.P., Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 13 Januari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dr. A.P., Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.

18	Program pelayanan publik	388.835.000	DAU
19	Program pengendalian harga dan inflasi daerah	149.200.000	DAU
20	Program pengembangan wilayah perbatasan	158.115.000	DAU
JUMLAH TOTAL		Rp 25.222.456.000	

Pemalang, 13 Januari 2020

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

Dr. H. JUNAEDI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dr. A.P., Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD yang diperoleh	Nilai	3,1
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh	Nilai	63
		Nilai Evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh	Nilai	10
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-Rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	Skor	82
4	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	100
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi	%	100
6	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	Persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	2,8
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase usulan raperda menjadi perda	%	90
8	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik;	Akumulasi laba perusda pertahun (Milyar Rupiah)	Rp	7

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	6.628.029.500	DAU
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.911.150.000	DAU
3	Program peningkatan disiplin aparatur	374.150.000	DAU
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	225.000.000	DAU
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	799.315.000	DAU
6	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	200.462.500	DAU
7	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4.270.254.000	DAU
8	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.374.275.000	DAU
9	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	445.765.000	DAU
10	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	358.400.000	DAU
11	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	555.495.000	DAU
12	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	706.740.000	DAU
13	Program penataan peraturan perundang-undangan	2.152.602.500	DAU
14	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.403.225.000	DAU
15	Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan	284.475.000	DAU
16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	233.160.000	DAU
17	Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi	603.807.500	DAU